



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
2023**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode triwulan akhir tahun, yang memuat perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan pada rencana strategis dan evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II. Renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menyajikan rencana kerja, program dan kegiatan dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2023 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2022 dan didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menggabungkan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika statistik dan persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 050/2821/SE/2023 tanggal 5 Juni 2022 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD

yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26); dan
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1) Tujuan

Tujuan perangkat daerah Dinas Kominfo dan Persandian yaitu meningkatkan layanan informasi publik dan meningkatkan keamanan informasi.

2) Sasaran

Sasaran perangkat daerah yaitu layanan informasi publik meningkat dan keamanan informasi meningkat.

B. Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan OPD.

2) Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi.
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai *Smart City*.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan keamanan informasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IITAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2023

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah :

1. **Meningkatnya Layanan Informasi Publik**, yang diukur dengan indikator sasaran Indeks Layanan Informasi Publik. Pada tahun 2022 Indeks Layanan Informasi Publik tercapai dengan tingkat capaian 123.44% sehingga target di tahun 2022 dan masih berjalan untuk tahun penilaian di tahun 2023 dan masih menggunakan penilaian tahun 2022.
2. **Meningkatnya Keamanan Informasi**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengamanan Informasi. Pada tahun 2022 telah tercapai dengan tingkat capaian 106.38% dan masih digunakan di tahun berjalan 2023.
3. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian** yang diukur dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Sasaran kinerja ini merupakan sasaran kinerja baru di tahun 2023 dengan target nilai 80 poin. Adapapun di tahun 2022 pemenuhan Reformasi Birokrasi mencapai nilai 92.76 poin.

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditunjukkan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2023, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sim Pelaporan (SIM Pengendalian Pembangunan) setiap bulan. Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan setiap tribulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program, Indikator, Target 2022, Realisasi 2022, & Target 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Ket
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	98.14%	98.52%	97.52%	
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	71.93%	135.84%	62.33%	
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	100%	107.10%	86.43%	
		Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	-	-	100%	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	-	-	100%	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
		Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	-	-	100%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	A	

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai indikator hasil penilaian sakip oleh Inspektorat mentargetkan nilai Sakip A sebagai indikator program dengan anggaran sebesar Rp.11.061.035.680,- dan telah terealisasi sebesar Rp.5.598.941.432,- sampai dengan triwulan II. Dalam program ini ada 7 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.061.035.680	5.598.941.432	50,62%	
1	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.027.000	20.349.700	43,27%	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.080.000	3.957.200	96,99%	100,00%

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000	275.000	32,35%	80,00%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	850.000	275.000	32,35%	55,00%
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	850.000	0	0,00%	30,00%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	850.000	0	0,00%	30,00%
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.495.000	2.362.500	42,99%	52,00%
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.052.000	13.480.000	39,59%	52,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.790.756.750	5.056.175.311	51,64%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.777.831.750	5.053.482.711	51,68%	71,69%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.840.000	458.000	24,89%	52,00%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.840.000	175.000	9,51%	52,00%
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	880.000	323.000	36,70%	52,00%
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	920.000	0	0,00%	10,00%
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.275.000	460.000	20,22%	85,00%
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4.825.000	1.276.600	26,46%	58,00%
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345.000	0	0,00%	80,00%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.865.000	1.957.500	33,38%	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	50,00%
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	50,00%
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	51,00%
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.525.000	1.957.500	43,26%	50,00%
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000	0	0,00%	52,00%
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	51,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.555.000	2.679.500	40,88%	
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.020.000	499.500	48,97%	77,00%
4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000	345.000	50,00%	57,00%
4.3	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	4.845.000	1.835.000	37,87%	60,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.259.930	304.431.538	51,66%	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.110.000	2.275.000	18,79%	41,00%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.874.180	40.207.230	49,72%	60,00%
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.194.150	4.815.900	47,24%	60,00%
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.041.200	3.620.000	32,79%	57,00%

5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	210.031.400	88.331.000	42,06%	50,00%
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.009.000	165.182.408	62,33%	82,51%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.422.000	79.800.828	27,57%	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.650.000	1.597.400	43,76%	50,00%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	11.954.790	33,21%	50,00%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	4.843.638	33,64%	50,00%
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.372.000	61.405.000	26,09%	52,00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.150.000	133.547.055	40,21%	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.730.000	46.713.855	30,39%	49,48%
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.170.000	6.195.600	14,35%	51,32%
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	3.456.000	12,68%	50,00%
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.000.000	77.181.600	71,46%	92,36%

Dari realisasi kegiatan tersebut, terdapat ketidaksesuaian realisasi dibandingkan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja maupun penambahan atau pengurangan pagu anggaran pada kegiatan. Pergeseran pagu anggaran kegiatan perubahan pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP diusulkan penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengangkatan CPNS ke PNS serta penyesuaian kenaikan jabatan dan tunjangan yang jumlahnya menyesuaikan perhitungan dari BPKAD dan BKPSDM
2. Pengurangan belanja pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena masih adanya stok yang tersedia
3. Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian AC
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan akan dikurangi anggarannya
5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diusulkan untuk menambah anggaran makan minum rapat untuk pelaksanaan kegiatan di akhir tahun
6. Penambahan anggaran pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu untuk biaya transfer keuangan semakin meningkat

7. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik akan dikurangi anggaran biaya telepon
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diusulkan penambahan untuk rehabilitasi ruang kerja dan pengecatan gedung selatan Dinas Kominfo dan Persandian.

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.004.329.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.464.859.300,- sampai dengan triwulan II. Dalam program ini ada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan terdapat 7 sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.004.329.500	1.464.859.300	48,76%	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.004.329.500	1.464.859.300	48,76%	
1.1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	218.620.000	34.285.000	15,68%	22,56%
1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.012.030.000	569.082.300	56,23%	61,57%
1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.191.641.500	593.612.500	49,81%	54,53%
1.4	Pelayanan Informasi Publik	275.996.000	109.222.000	39,57%	51,90%
1.5	Layanan Hubungan Media	68.382.000	25.700.000	37,58%	51,48%
1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	41.250.000	18.000.000	43,64%	72,00%
1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	196.410.000	114.957.500	58,53%	64,48%

Dari anggaran diatas diusulkan penambahan pagu anggaran pada perubahan anggaran 2023 yaitu :

1. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian smartphone untuk pembuatan konten di media sosial
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik ada penambahan untuk produksi acara di TVRI dan untuk rontek
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik diusulkan penambahan untuk lomba foto dan festival film kampung dan penambahan belanja modal peralatan produksi konten dan peliputan
4. Penambahan honor narasumber tokoh masyarakat serta transport peserta forum KIM pada Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

3) Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp.13.582.096.700,- dan telah terealisasi Rp.4.471.708.009,- sampai dengan bulan Juni. Ada 2 kegiatan dalam program ini yaitu:

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	13.582.096.700	4.471.708.009	32,92%	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.150.196.000	1.459.886.426	28,35%	
1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.150.196.000	1.459.886.426	28,35%	33,33%
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.431.900.700	3.011.821.583	35,72%	
2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	308.340.000	82.913.500	26,89%	42,33%
2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.525.672.700	1.936.523.158	35,05%	60,59%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	686.071.000	328.270.025	47,85%	57,34%
2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.272.492.000	417.618.900	32,82%	46,35%
2.5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	212.913.000	54.541.000	25,62%	50,00%
2.6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	174.312.000	63.580.000	36,47%	44,67%
2.7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	252.100.000	128.375.000	50,92%	97,26%

Realisasi keuangan pada Program Aplikasi Informatika sampai dengan triwulan II masih dibawah 50%, hal ini dikarenakan rencana realisasi anggaran memang ada di triwulan II dan IV. Pada anggaran perubahan diusulkan penambahan anggaran belanja yaitu :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah diusulkan penambahan untuk upgrade komputer di lab komputer, pembelian perangkat pendukung ruang Yudhistira, peremajaan perangkat jaringan, pemasangan CCTV Kawasan Kotabaru dan penambahan pemeliharaan panel jaringan LAN

2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah mengusulkan tambahan anggaran belanja untuk penambahan RAM Nutanix, pemeliharaan jaringan sprinkle khusus untuk data center, pembelian APAR CO2, pembelian AC data center dan perpanjangan lisensi zoom
3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah mengusulkan tambahan anggaran untuk IP Paging dan faximile
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diusulkan tambahan untuk Jasa Konsultansi Penataan Fiber Optik Persimpangan di Kota Yogyakarta
5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah mengusulkan tambahan untuk pengadaan komputer, laptop, printer, perbaikan perangkat digital di ruang Yudhistira.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada triwulan II tahun 2023 program ini telah merealisasi anggaran sebesar Rp. 62.620.000,- dari anggaran Rp. 209.557.000,-. Dalam program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat usulan penambahan anggaran belanja pada kegiatan ini yaitu makan minum rapat untuk kegiatan koordinasi.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	209.557.000	62.620.000	29,88%	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	209.557.000	62.620.000	29,88%	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	93.630.000	42.526.000	45,42%	50,00%
1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	115.927.000	20.094.000	17,33%	22,88%

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran pada program ini sebesar Rp 285.239.168,- dan telah terealisasi sebesar Rp118.304.000,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	285.239.168	118.304.000	41,48%	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	238.218.000	101.969.000	42,80%	
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	229.750.000	99.035.000	43,11%	53,62%
1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.468.000	2.934.000	34,65%	50,00%
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	47.021.168	16.335.000	34,74%	
2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.021.168	16.335.000	34,74%	44,00%

Evaluasi terhadap hasil renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.2 berikut.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPDTW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	97,52	0	97.52	0	97.30	1.464.859.300,00	99.77%	0,00%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			218.620.000,00	22,56%	48.740.000,00	22,56%	34.285.000,00	100,00%	70,34%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen		0,00%		22,56%		0,00%	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			1.012.030.000,00	63,85%	649.530.000,00	61,57%	569.082.300,00	96,43%	87,61%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen		0,00%		61,57%		0,00%	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1.191.641.500,00	61,04%	700.570.500,00	54,53%	593.612.500,00	89,33%	84,73%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen		0,00%		54,53%		0,00%	
4	Pelayanan Informasi Publik			275.996.000,00	51,90%	115.144.000,00	51,90%	109.222.000,00	100,00%	94,86%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen		0,00%		51,90%		0,00%	
5	Layanan Hubungan Media			68.382.000,00	41,79%	28.348.000,00	51,48%	25.700.000,00	123,19%	90,66%
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan		41,79%		51,48%		123,19%	
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			41.250.000,00	52,00%	21.450.000,00	72,00%	18.000.000,00	138,46%	83,92%
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen		52,00%		72,00%		138,46%	
7				196.410.000,00	64,48%	121.720.000,00	64,48%	114.957.500,00	100,00%	94,44%

		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.440 orang		0,00%		64,48%		0,00%	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	86,43%	0	81.90 %	0	81.90 %	4.471.708.009,00	100%	0,00%
			Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	62,33	0	62.33	0	135.84	0	217,94%	0,00%
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	100,00%	0	100	0	100	0	100,00%	0,00%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			5.150.196.000,00	36,96%	1.864.142.500,00	33,33%	1.459.886.426,00	90,18%	78,31%
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit		0,00%		33,33%		0,00%	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			308.340.000,00	45,25%	135.808.000,00	42,33%	82.913.500,00	93,55%	61,05%
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0,00%		42,33%		0,00%	
	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			5.525.672.700,00	49,98%	2.186.212.200,00	60,59%	1.936.523.158,00	121,23%	88,58%
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		0,00%		60,59%		0,00%	
	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			686.071.000,00	63,39%	372.015.000,00	57,34%	328.270.025,00	90,46%	88,24%
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	3 Dokumen		0,00%		62,04%		0,00%	
	5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			1.272.492.000,00	48,61%	585.341.000,00	46,35%	417.618.900,00	95,35%	71,35%
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	18 unit		0,00%		46,35%		0,00%	
	6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			212.913.000,00	48,00%	59.202.000,00	50,00%	54.541.000,00	104,17%	92,13%
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan		0,00%		50,00%		0,00%	

	7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			174.312.000,00	44,67%	40.750.000,00	44,67%	63.580.000,00	100,00%	156,02%
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen		0,00%		44,67%		0,00%	
	8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			252.100.000,00	97,26%	244.600.000,00	97,26%	128.375.000,00	100,00%	52,48%
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0,00%		97,26%		0,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase pemanfaatan informasi data statistik	100	0	50	0	50	62.620.000,00	100%	0,00%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			93.630.000,00	54,00%	48.470.000,00	50,00%	42.526.000,00	92,59%	87,74%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 dokumen		54,00%		50,00%		92,59%	
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral			115.927.000,00	44,40%	48.820.000,00	22,88%	20.094.000,00	51,53%	41,16%
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 dokumen		0,00%		22,88%		0,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100,00%	0	100%	0	100%	118.304.000,00	100%	0,00%
			Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100,00%	0	100	0	100	0	100,00%	0,00%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			229.750.000,00	53,62%	103.935.000,00	53,62%	99.035.000,00	100,00%	95,29%
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Dokumen		0,00%		53,62%		0,00%	
	2				8.468.000,00	50,00%	3.290.000,00	50,00%	2.934.000,00	100,00%	89,18%

		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informas	1 Perangkat Daerah		50,00%		50,00%		100,00%	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											
	3	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			47.021.168,00	43,88%	20.634.000,00	44,00%	16.335.000,00	100,27%	79,17%
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah		43,88%		44,00%		100,27%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A	0	A	0	A	5.598.941.432,00	100%	0,00%	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.080.000,00	100,00%	4.080.000,00	100,00%	3.957.200,00	100,00%	96,99%
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			850.000,00	80,00%	575.000,00	80,00%	275.000,00	100,00%	47,83%
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen		80,00%		80,00%		100,00%	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			850.000,00	50,00%	275.000,00	55,00%	275.000,00	110,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen		50,00%		55,00%		110,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			850.000,00	0,00%	0	30,00%	0	0,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen		0,00%		30,00%		0,00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			850.000,00	0,00%	0	30,00%	0	0,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen		0,00%		30,00%		0,00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.495.000,00	50,00%	2.575.000,00	52,00%	2.362.500,00	104,00%	91,75%
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan		50,00%		52,00%		104,00%	

	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.052.000,00	50,40%	13.480.000,00	52,00%	13.480.000,00	103,17%	100,00%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		50,40%		52,00%		103,17%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.777.831.750,00	71,11%	6.296.357.682,00	71,69%	5.053.482.711,00	100,82%	80,26%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 orang/bulan		0,00%		71,69%		0,00%	
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.840.000,00	51,00%	920.000,00	52,00%	458.000,00	101,96%	49,78%
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		51,00%		52,00%		101,96%	
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.840.000,00	51,00%	920.000,00	52,00%	175.000,00	101,96%	19,02%
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		51,00%		52,00%		101,96%	
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			880.000,00	51,00%	440.000,00	52,00%	323.000,00	101,96%	73,41%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		51,00%		52,00%		101,96%	
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			920.000,00	0,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan		0,00%		10,00%		0,00%	
	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.275.000,00	85,00%	1.700.000,00	85,00%	460.000,00	100,00%	27,06%
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen		85,00%		85,00%		100,00%	
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4.825.000,00	57,00%	2.275.000,00	58,00%	1.276.600,00	101,75%	56,11%
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan		57,00%		58,00%		101,75%	
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			345.000,00	100,00%	345.000,00	80,00%	0	80,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		100,00%		80,00%		80,00%	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%	
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%	
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		50,00%		51,00%		102,00%	
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.525.000,00	50,00%	1.975.000,00	50,00%	1.957.500,00	100,00%	99,11%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%	
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			460.000,00	60,00%	230.000,00	52,00%	0	86,67%	0,00%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		60,00%		52,00%		86,67%	
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		50,00%		51,00%		102,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1.020.000,00	50,00%	510.000,00	77,00%	499.500,00	154,00%	97,94%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen		50,00%		77,00%		154,00%	
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			690.000,00	50,00%	345.000,00	57,00%	345.000,00	114,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen		50,00%		57,00%		114,00%	
24	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			4.845.000,00	55,00%	1.970.000,00	60,00%	1.835.000,00	109,09%	93,15%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen		55,00%		60,00%		109,09%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										

25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.110.000,00	60,00%	7.116.000,00	41,00%	2.275.000,00	68,33%	31,97%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		60,00%		41,00%		68,33%	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.874.180,00	70,00%	53.209.750,00	60,00%	40.207.230,00	85,71%	75,56%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		70,00%		60,00%		85,71%	
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.194.150,00	60,00%	4.834.500,00	60,00%	4.815.900,00	100,00%	99,62%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket		60,00%		60,00%		100,00%	
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.041.200,00	53,00%	5.733.100,00	57,00%	3.620.000,00	107,55%	63,14%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		53,00%		57,00%		107,55%	
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			210.031.400,00	49,98%	105.015.702,00	50,00%	88.331.000,00	100,04%	84,11%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%	
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			265.009.000,00	81,91%	200.459.000,00	82,51%	165.182.408,00	100,73%	82,40%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan		0,00%		82,51%		0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.650.000,00	58,00%	2.070.000,00	50,00%	1.597.400,00	86,21%	77,17%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		58,00%		50,00%		86,21%	
32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			36.000.000,00	49,98%	18.000.000,00	50,00%	11.954.790,00	100,04%	66,42%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		49,98%		50,00%		100,04%	
33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.400.000,00	49,98%	7.200.000,00	50,00%	4.843.638,00	100,04%	67,27%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		49,98%		50,00%		100,04%	
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			235.372.000,00	49,98%	63.905.000,00	52,00%	61.405.000,00	104,04%	96,09%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		0,00%		52,00%		0,00%	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			153.730.000,00	49,43%	75.940.000,00	49,48%	46.713.855,00	100,10%	61,51%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit		0,00%		49,48%		0,00%	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			43.170.000,00	50,61%	21.870.000,00	51,32%	6.195.600,00	101,40%	28,33%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit		0,00%		51,32%		0,00%	
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.250.000,00	50,00%	13.625.000,00	50,00%	3.456.000,00	100,00%	25,37%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit		50,00%		50,00%		100,00%	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			108.000.000,00	100,00%	108.000.000,00	92,36%	77.181.600,00	92,36%	71,46%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		0,00%		92,36%		0,00%	

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022. Kesenambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mempunyai tugas yang besar mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai *Smart City* maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No: 050/2821/SE/2023 tanggal 05 Juni 2023 hal Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Dalam perencanaan kerja perubahan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 telah kami mencermati beberapa output yang perlu disesuaikan, baik target maupun besarnya anggaran yang diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan.

Dalam perjalannya program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2023 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam dalam lampiran tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

NO	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TA 2023	OUTPUT/KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN MURNI 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH
			MURNI	PERUBAHAN	SATUAN			
	BELANJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					28.142.258.048	33.570.879.443	5.428.621.395
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.061.035.680	12.400.519.075	1.339.483.395
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					47.027.000	47.027.000	-
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	dokumen	4.080.000	4.080.000	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	2	2	dokumen	850.000	850.000	-
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	dokumen	850.000	850.000	-
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	dokumen	850.000	850.000	-
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	dokumen	850.000	850.000	-
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	laporan	5.495.000	5.495.000	-

1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	laporan	34.052.000	34.052.000	-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.790.756.750	10.395.054.750	604.298.000
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	81	orang/ bulan	9.777.831.750	10.382.129.750	604.298.000
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	dokumen	1.840.000	1.840.000	-
1.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	dokumen	1.840.000	1.840.000	-
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	dokumen	880.000	880.000	-
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	laporan	920.000	920.000	-
1.2.6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	dokumen	2.275.000	2.275.000	-
1.2.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	laporan	4.825.000	4.825.000	-
1.2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	dokumen	345.000	345.000	-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.865.000	5.865.000	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	dokumen	220.000	220.000	-
1.3.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	dokumen	220.000	220.000	-

1.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	laporan	220.000	220.000	-
1.3.4	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	laporan	4.525.000	4.525.000	-
1.3.5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	laporan	460.000	460.000	-
1.3.6	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	dokumen	220.000	220.000	-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					6.555.000	6.555.000	-
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	dokumen	1.020.000	1.020.000	-
1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	dokumen	690.000	690.000	-
1.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	dokumen	4.845.000	4.845.000	-
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					589.259.930	603.470.325	14.210.395
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	paket	12.110.000	12.110.000	-
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	paket	80.874.180	76.085.775	4.788.405
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	paket	10.194.150	28.409.150	18.215.000
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	paket	11.041.200	9.675.000	1.366.200
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	2	dokumen	210.031.400	210.031.400	-

1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	laporan	265.009.000	267.159.000	2.150.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	78.125.000	78.125.000
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		45	unit	-	78.125.000	78.125.000
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					289.422.000	285.272.000	- 4.150.000
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	laporan	3.650.000	5.500.000	1.850.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	laporan	36.000.000	30.000.000	- 6.000.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	laporan	14.400.000	14.400.000	-
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	laporan	235.372.000	235.372.000	-
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					332.150.000	979.150.000	647.000.000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	unit	153.730.000	153.730.000	-
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	unit	43.170.000	43.170.000	-
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	41	unit	27.250.000	27.250.000	-
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	unit	108.000.000	755.000.000	647.000.000

2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.004.329.500	3.351.298.500	346.969.000
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.004.329.500	3.351.298.500	346.969.000
2.1.1	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4	4	dokumen	218.620.000	242.620.000	24.000.000
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5	5	dokumen	1.012.030.000	1.066.255.000	54.225.000
2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	6	dokumen	1.191.641.500	1.419.565.500	227.924.000
2.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3	3	dokumen	275.996.000	274.996.000	- 1.000.000
2.1.5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2	2	layanan	68.382.000	68.382.000	-
2.1.6	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	1	dokumen	41.250.000	41.250.000	-
2.1.7	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1440	1440	orang	196.410.000	238.230.000	41.820.000
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					13.582.096.700	17.324.020.700	3.741.924.000
3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					5.150.196.000	7.396.466.000	2.246.270.000
3.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	1	unit	5.150.196.000	7.396.466.000	2.246.270.000
3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					8.431.900.700	9.927.554.700	1.495.654.000

3.2.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	308.340.000	278.113.000	- 30.227.000
3.2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	unit	5.525.672.700	5.996.772.700	471.100.000
3.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3	3	dokumen	686.071.000	893.071.000	207.000.000
3.2.4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	18	18	Unit	1.272.492.000	1.217.868.000	- 54.624.000
3.2.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4	4	layanan	212.913.000	310.138.000	97.225.000
3.2.6	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	1	dokumen	174.312.000	174.312.000	-
3.2.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	3	dokumen	252.100.000	1.057.280.000	805.180.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					209.557.000	209.802.000	245.000
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					209.557.000	209.802.000	245.000
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5	5	dokumen	93.630.000	96.225.000	2.595.000
4.1.2	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	2	dokumen	115.927.000	113.577.000	- 2.350.000

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI					285.239.168	285.239.168	-
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					238.218.000	238.218.000	-
5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	12	laporan	229.750.000	229.750.000	-
5.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1	1	Perangkat Daerah	8.468.000	8.468.000	-
5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					47.021.168	47.021.168	-
5.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	42	42	Perangkat Daerah	47.021.168	47.021.168	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Awal RKPD Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan RPJMD Kota Yogyakarta. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 serta program dan kegiatan yang telah berjalan di tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Yogyakarta,

2023

IGNATIUS TRIHASTONO, S.Sos., MM
NIP. 196907231996031005